**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP
FINANCIAL RESTATEMENTS
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2016)**

Intan Margareth Chyntia¹⁾, Azwir Nasir²⁾, Desmiyawati²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : intan.mc@gmail.com

*The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements
(Empirical Study of Companies Listed on Indonesia Stock Exchange
(IDX) in 2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of audit committee characteristics on financial restatements. Audit committee characteristics used in this study are audit committee independence, audit committee meeting, audit committee size, and audit committee expertise. The population in this study is all companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016. Research sample is determined using a purposive sampling method. The data in this research is obtained by annual reports of 27 companies that have restated their financial restatements and 27 companies that did not restate their financial restatements, resulting in a total of 54 samples. This study uses the Logistic Regression as a method of analysis. The results prove that audit committee expertise influence financial restatements. Meanwhile, audit committee independence, audit committee meeting, and audit committee size have no significant effect on financial restatements.

Keywords: audit committee, corporate governance, financial restatements

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pihak pemangku kepentingan eksternal, terutama investor dan kreditor. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan yang bernilai harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang memandu keseluruhan pengakuan, penilaian, dan penyajian laporan keuangan (Veronica & Bachtiar, 2005).

Proses penyusunan laporan keuangan di Indonesia didasarkan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan PSAK yang berlaku umum ini memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk melakukan dan memilih metode akuntansi yang akan diterapkan dalam perusahaan (Wasilah, 2005). Keadaan ini akan selalu menciptakan kemungkinan bagi manajemen untuk menyediakan laporan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum. Bersamaan dengan itu, sebuah laporan keuangan yang telah

disajikan kembali diterbitkan (Veronica & Bachtiar, 2005).

Masalah terkait laporan keuangan, khususnya *financial restatements*, terus berlanjut menjadi terkenal dengan jumlah penyajian kembali yang terus tumbuh mengikuti kasus *high profile* dalam beberapa tahun terakhir yang menyisakan investor dengan kerugian besar (Abdullah *et al.*, 2010).

Financial restatements memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan, yang dapat membebankan biaya yang besar pada perusahaan (Eshagniya & Salehi, 2017), seperti pernyataan berlebihan yang dilakukan Tesco Plc terhadap pendapatan mereka pada tahun 2014 setelah ditemukan kekurangan £250 juta dalam estimasi keuntungannya dan kasus Enron yang menyajikan kembali pendapatan mereka setelah mengumumkan kerugian US\$618 juta pada laporan keuangannya tahun 2001 periode triwulan 3. Dalam ke-2 kasus tersebut, harga saham mengalami penurunan yang drastis, yang mengakibatkan kerugian besar bagi pemegang saham dari perusahaan tersebut (W. M. Wan Mohamad *et al.*, 2018).

Di Indonesia, kasus *financial restatements* kembali terjadi pada tahun 2018. PT. Bank Bukopin Tbk. (BBKP) merevisi laporan keuangannya tahun 2015 dan 2016. Sejumlah variabel dalam laporan juga berubah signifikan. Misalnya, laba tahun 2016 sebelumnya tercatat sebesar Rp 1,08 triliun. Namun, dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017, laba perusahaan dicatatkan sebesar Rp 183,53 miliar. Bukan hanya variabel laba, perubahan yang cukup signifikan

juga terjadi pada total pendapatan bunga dan syariah (finance.detik.com). Sehubungan dengan berita penyajian kembali laporan keuangan tersebut, harga saham BBKP sempat menyentuh level terendah sejak 9 April 2010 (bareksa.com).

Financial restatements didefinisikan sebagai revisi laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya untuk mencerminkan koreksi kesalahan (FASB Statement No. 154). *Financial restatements* dilakukan apabila informasi pada laporan keuangan sebelumnya berisi ketidaktepatan material. U.S. Government Accountability Office atau GAO (2002) menyatakan bahwa *financial restatement* terjadi ketika sebuah perusahaan, baik secara sukarela atau diminta oleh auditor maupun regulator, merevisi informasi keuangan publik yang telah dilaporkan sebelumnya.

Financial restatements menimbulkan pertanyaan tentang integritas manajemen, kelayakan pengendalian internal, efektivitas komite audit, independensi auditor, dan kualitas audit (Gleason *et al.*, 2008). Oleh karena itu, *financial restatements* adalah perspektif baru dan penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan praktik *corporate governance* (Kusuma, 2014).

Menurut Cadbury Committee, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002). Mekanisme *corporate governance* berguna untuk mencegah terjadinya penyajian kembali laporan keuangan karena tata kelola perusahaan bertujuan untuk memberikan laporan keuangan secara tepat waktu serta memberikan pengawasan dalam membuat laporan keuangan (Veronica & Bachtiar, 2005).

Berbagai upaya dalam penegakan *good corporate governance* di Indonesia telah dilakukan. Pada tahun 2001, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) membuat suatu pedoman *good corporate governance* dimana pedoman ini disempurnakan pada tahun 2006. Dalam pedoman tersebut, terdapat pedoman untuk pembentukan beberapa komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, salah satunya adalah komite audit.

Peraturan tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit diatur dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-643/BL/2012 serta Lampiran Peraturan Nomor IX.I.5 dan diperbaharui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan

dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

Keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai keragaman sumber daya anggota komite audit yang dapat dilihat dari berbagai karakteristik, seperti independensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, dan keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit. Adanya berbagai perbedaan karakteristik dalam komite audit merupakan suatu keunggulan kompetitif yang dipandang mampu menghasilkan strategi perusahaan yang lebih baik (Carter *et al.*, 2003).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh W. M. Wan Mohamad *et al.* (2018) mengenai analisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap kemungkinan terjadinya penyajian kembali laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk tahun 2008 dan 2009. Terdapat tiga perbedaan sebagai bentuk penyesuaian dan modifikasi akibat perbedaan kondisi pasar modal. Perbedaan pertama mengenai populasi penelitian, penelitian ini meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan kedua terletak pada periode tahun yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan periode tahun terkini, yaitu tahun 2016 guna memberikan gambaran terkini mengenai efektivitas praktik pengawasan yang dilakukan oleh

komite audit di Indonesia. Perbedaan ketiga pada variabel kontrol yang digunakan, penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa *leverage* dan ukuran perusahaan.

Sampel perusahaan dalam penelitian ini diidentifikasi menurut *GAO's definition of restatements*. Perusahaan yang melakukan penyajian kembali karena merger dan akuisisi yang sesuai PSAK, *stocksplits*, penerapan PSAK baru, dan perubahan metode akuntansi tidak dimasukkan sebagai sampel penelitian karena faktor-faktor tersebut tidak mengindikasikan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menganalisis hubungan antara prinsipal (*principal*) sebagai pemilik sumber daya dengan agen (*agent*) sebagai pengelola sumber daya. Prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen dengan harapan agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pendelegasian wewenang tersebut menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) yang dimulai dari ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi (*asymmetric information*) yang memicu terjadinya konflik.

Untuk mengatasi masalah keagenan tersebut, diperlukan mekanisme yang berfungsi untuk melindungi kepentingan prinsipal,

yaitu dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG). Salah satu mekanisme GCG yang menjadi sangat penting dalam memengaruhi perilaku manajemen dalam memilih suatu alternatif atau keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan *principal* daripada kepentingan *agent* adalah keberadaan komite audit. Di dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury *et al.*, 2004). Dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien tersebut, komite audit dapat berperan menyelesaikan konflik antara *principal* dan *agent* serta untuk menjaga kinerja yang lebih baik.

Financial Restatements

Financial restatements didefinisikan sebagai revisi laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya untuk mencerminkan koreksi kesalahan (FASB Statement No. 154).

Menurut *GAO's Definition of Restatements* (2006), faktor-faktor yang menyebabkan *financial restatements* adalah penerapan akuntansi yang tidak tepat untuk: biaya atau beban; pengakuan pendapatan; derivatif, waran, opsi saham, dan efek konversi lainnya; restrukturisasi, aset, dan persediaan; reklasifikasi, akuisisi dan merger; transaksi dengan pihak terkait; penelitian dan pengembangan dalam proses; dan lainnya, seperti piutang macet, penghapusan piutang, dan tunjangan lain untuk piutang ragu-ragu.

Di Indonesia, PSAK 25 (Penyesuaian

2014) mengelompokkan faktor utama yang memengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam tiga kelompok, yaitu perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.

Corporate Governance

Menurut Cadbury Committee, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *good corporate governance* (selanjutnya disebut GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar.

Corporate governance dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mendorong kesinambungan dalam perusahaan melalui pengelolaan yang bersumber dari prinsip yang ada (KNKG, 2006).

Komite Audit

Berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Dewan komisaris

memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit dikatakan independen apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik ataupun pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan

- tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6(enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Teori agensi menyatakan bahwa dalam meminimalkan tingkat kesalahan penyajian informasi, diperlukan pengawasan langsung dari pihak yang merupakan wakil dari *principal* sehingga pengawasan terhadap manajemen akan semakin meningkat dan konflik agensi juga dapat ditekan dengan adanya komite audit yang independen yang akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat independensi komite audit dalam suatu perusahaan, maka hal tersebut dapat menekan kemungkinan terjadinya *financial restatements*.

Teori ini didukung dengan hasil penelitian Carcello (2011), Lary *et al.* (2012), Ali *et al.* (2017), dan W. M. Wan Mohamad *et al.* (2018) yang menemukan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

H1: Terdapat pengaruh negatif antara independensi komite audit terhadap financial restatements

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit perlu mengadakan rapat antar sesama anggota maupun dengan pihak lainnya untuk membahas temuan-temuan yang perlu dievaluasi. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dalam setiap rapatnya, rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan kegiatan komite audit dan ukuran efektivitasnya. Semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, dalam semua hal lainnya dianggap sama, maka hal tersebut dapat menekan kemungkinan terjadinya *financial restatements*.

Teori ini didukung dengan hasil penelitian Ali *et al.* (2017) dan W. M. Wan Mohamad *et al.* (2018) yang menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

H2: Terdapat pengaruh negatif antara frekuensi rapat komite audit terhadap financial restatements

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik agar dapat berjalan dengan efektif. Namun, tiga sampai lima anggota biasanya merupakan jumlah yang cukup ideal (FCGI, 2002), dimana apabila komite audit terlalu kecil maka fungsi pengawasan akan menjadi tidak maksimal karena kekurangan sumberdaya untuk pendistribusian tugas-tugas komite audit.

Al-Najjar (2011) menyatakan bahwa komite audit yang memiliki ukuran yang besar, lebih efektif dalam mengawasi manajemen puncak dan kualitas laporan keuangan, yang mana kemungkinan terjadinya *financial restatements* menjadi berkurang. Semakin banyaknya komite audit yang ada di dalam perusahaan, maka hal tersebut dapat menekan kemungkinan terjadinya *financial restatements*.

Teori ini didukung dengan hasil penelitian Lin *et al.* (2006), Rani (2011), Ali *et al.* (2017), dan W. M. Wan Mohamad *et al.* (2018) yang menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

H3: Terdapat pengaruh negatif antara ukuran komite audit terhadap *financial restatements*

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Laporan keuangan merupakan objek *oversight* dari

komite audit. Oleh karena itu, KNKG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) menyatakan bahwa salah seorang anggota komite audit setidaknya memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal & Cadha, 2005). Semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian akuntansi/keuangan dalam suatu perusahaan, maka hal tersebut dapat menekan kemungkinan terjadinya *financial restatements*.

Teori ini didukung dengan hasil penelitian Carcello (2011), Rani (2011), Lary *et al.* (2012) dan W. M. Wan Mohamad *et al.* (2018) yang menemukan bahwa keahlian komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

H4: Terdapat pengaruh negatif antara keahlian komite audit terhadap *financial restatements*

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel sesuai dengan kriteria tertentu.

Adapun kriteria penentuan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya yang telah diaudit (*audited financial statement*) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016-2017 yang disajikan dalam rupiah agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing.
3. Perusahaan yang melakukan penyajian kembali laporan keuangannya (*financial restatements*) tahun 2016 sesuai kriteria *GAO's definition of restatements* (2006).
4. Perusahaan yang memiliki ketersediaan data tentang karakteristik komite audit yang lengkap.
5. Sampel perusahaan yang melakukan *financial restatements* dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *financial restatements* berdasarkan beberapa klasifikasi (Arthaud-Day *et al.*, 2006), yaitu memiliki kesamaan tahun laporan keuangan, RI, sektor, dan berada pada kategori papan yang sama (W. M. Wan Mohamad *et al.*, 2018). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang dipakai adalah total aset.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 yang dapat diperoleh melalui situs web www.idx.co.id dan situs

perusahaan yang bersangkutan.

Untuk menemukan bukti perusahaan yang melakukan *financial restatements*, pencarian dilakukan pada setiap laporan tahunan perusahaan dengan menggunakan beberapa kata kunci, seperti penyajian kembali, disajikan kembali, menyajikan kembali, penerbitan kembali, penyesuaian tahun sebelumnya, *restate*, dan kembali laporan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mengolah literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dari sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Financial Restatements

Financial restatements adalah penyajian kembali laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya kesalahan yang material pada laporan keuangan yang sebelumnya telah disajikan. *Financial restatements* dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan.

Variabel ini dinyatakan dengan *RESTATE* dan diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu angka 1 bagi perusahaan yang melakukan *financial restatements* dan angka 0 bagi perusahaan yang tidak melakukan *financial restatements*.

Variabel Independen

Independensi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit dikatakan independen apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik ataupun pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Variabel independensi komite audit pada penelitian ini dinyatakan dengan AUCI yang dihitung berdasarkan jumlah komite audit

yang independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, rapat komite audit diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Variabel frekuensi rapat komite audit dalam penelitian ini dinyatakan dengan NOACM yang dihitung berdasarkan jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit.

Ukuran Komite Audit

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik agar dapat berjalan dengan efektif.

Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini dinyatakan dengan ACSIZE yang dihitung berdasarkan jumlah komite audit.

Keahlian Komite Audit

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi yang bergelar sarjana,

magister, maupun doktor dari universitas dalam negeri maupun luarnegeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non-formal yang berkaitan dengan keahlian keuangan dan administrasi bisnis.

Sedangkan keahlian komite audit dinilai berdasarkan pedoman FCGI (2002) yang menyatakan bahwa paling sedikit satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman mengenai lingkungan bisnis perusahaan yang dapat dilihat dari profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, menjadi akademisi, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun *internal control* pada perusahaan lain.

Variabel penelitian ini dinyatakan dengan NOEXPERT yang dihitung berdasarkan jumlah komite audit yang memiliki pengalaman tentang keuangan atau akuntansi sebelumnya.

Variabel Kontrol

Leverage

Leverage menggambarkan jumlah pinjaman (utang) perusahaan yang dibiayai oleh aset dan modal. Indikator yang digunakan adalah *Total Debt to Total Assets* yang menunjukkan perbandingan antara utang dengan aset. Variabel penelitian ini dinyatakan dengan LEV yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$LEV = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan.

Variabel penelitian ini dinyatakan dengan SIZE dan dihitung dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Model Regresi Logistik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*) dengan model sebagai berikut:

$$RESTATE = \alpha_0 + \beta_1 AUCI + \beta_2 NOACM + \beta_3 ACSIZE + \beta_4 NOEXPERT + \beta_5 LEV + \beta_6 SIZE + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dari hasil pengujian statistik deskriptif, maka diperoleh hasil seperti Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Restatements	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
AUCI	Nonrestated	27	1,0000	,00000	1,00	1,00
	RESTATED	27	,9648	,08943	,67	1,00
	Total	54	,9824	,06511	,67	1,00
NOACM	Nonrestated	27	11,5926	6,50005	4,00	30,00
	RESTATED	27	8,5926	8,27535	4,00	35,00
	Total	54	10,0926	7,52422	4,00	35,00
ACSIZE	Nonrestated	27	3,2593	,52569	3,00	5,00
	RESTATED	27	3,3333	,78446	3,00	6,00
	Total	54	3,2963	,66246	3,00	6,00
NOEXPERT	Nonrestated	27	2,9259	,67516	2,00	4,00
	RESTATED	27	2,5185	1,08735	1,00	5,00
	Total	54	2,7222	,91973	1,00	5,00
LEV	Nonrestated	27	,5338	,25385	,08	,98
	RESTATED	27	,5272	,20918	,14	,91
	Total	54	,5305	,23041	,08	,98

S I Z E	Nonrestated	27	29,6466	1,73482	26,74	34,15
	RESTATED	27	29,5750	1,90761	25,88	34,54
	Total	54	29,6108	1,80634	25,88	34,54

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian pada perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan *financial restatements*. Statistik menunjukkan nilai rata-rata independensi komite audit (AUCI) untuk perusahaan yang tidak melakukan *financial restatements* adalah 1,0000 anggota independen sedangkan untuk perusahaan yang melakukan *financial restatements* adalah 0,9648 anggota independen. Rata-rata frekuensi rapat komite audit (NOACM) untuk perusahaan yang tidak melakukan *financial restatements* adalah 11,5926 kali, yang mana lebih banyak dari perusahaan yang melakukan *financial restatements* dengan rata-rata 8,5926 kali. Rata-rata ukuran komite audit (ACSIZE) untuk perusahaan yang tidak melakukan *financial restatements* adalah 3,2593 anggota, yang mana lebih sedikit dari perusahaan yang melakukan *financial restatements* dengan rata-rata 3,3333 anggota. Selain itu, perusahaan yang tidak melakukan *financial restatements* memiliki rata-rata 2,9259 anggota komite audit dengan keahlian keuangan/ akuntansi (NOEXPERT), yang mana lebih besar dari perusahaan yang melakukan *financial restatements* yang memiliki rata-rata 2,5185 anggota komite audit. Secara umum, komite audit lebih kuat pada perusahaan yang tidak melakukan *financial restatements* karena lebih independen, lebih sering melakukan pertemuan, dan memiliki lebih

banyak anggota dengan keahlian keuangan/ akuntansi.

Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Tabel 2
Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	10,289	8	,245

Sumber: Data Olahan (2019)

Pengujian menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 10,289 dengan signifikansi (p) sebesar 0,245. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya.

Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Tabel 3
Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Iterasi	-2 Log likelihood	Coefficients				
		AUCI	NOACM	ACSIZE	NOEXPERT	LEVE
Step 1	63,441	-	-,059	,959	-,984	-,151
	63,122	4,259	-,074	1,095	-,142	-,200
	63,119	5,508	-,075	1,103	-,155	-,206
	63,119	5,659	-,075	1,103	-,155	-,206
	63,119	5,661	-,075	1,103	-,155	-,206

a. Method: Enter
b. Initial -2 Log Likelihood: 74,860
c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data Olahan (2019)

Nilai -2LL awal adalah sebesar 74,860. Setelah dimasukkan empat variabel independen dan dua variabel kontrol maka nilai akhir mengalami penurunan menjadi 63,119. Penurunan *Likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang

lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,343 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijadikan oleh variabel independen adalah sebesar 34,3% sedangkan sisanya sebesar 65,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	58,826 ^a	,257	,343

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Sumber: Data Olahan (2019)

Uji Regresi Logistik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik dan hasil yang terbentuk disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Uji Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	AUCI	127,144	77987,604	,000	1	,999	,000
	NOACM	-,059	,047	1,573	1	,210	,943
	ACSI	,574	,809	,504	1	,478	1,775
	NOEXPE	-1,164	,484	5,771	1	,016	,312
	LEV	-,174	1,613	,012	1	,914	,840
	SIZE	-,050	,241	,044	1	,834	,951
	Constant	130,353	77987,604	,000	1	,999	4,089E+56

Sumber: Data Olahan (2019)

PEMBAHASAN

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Financial Restatements

Variabel independensi komite audit (AUCI) menunjukkan koefisien

regresi sebesar -127,144 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,999 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ke-1 tidak diterima dan dapat dinyatakan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap financial restatements. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi komite audit dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial restatements yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil tersebut dikarenakan rata-rata sampel penelitian telah memiliki proporsi komite audit independen yang tinggi sebesar 0,9824 yang dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Financial Restatements

Variabel frekuensi rapat komite audit (NOACM) menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,59 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,210 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ke-2 tidak diterima dan dapat dinyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap financial restatements. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering komite audit dalam suatu perusahaan melakukan rapat tidak berpengaruh terhadap financial

restatements yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini disebabkan karena pembentukan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat mandatori terhadap peraturan yang ada sehingga menyebabkan komite audit belum berfungsi secara efektif. Hal ini menjadi lebih parah jika dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh anggota komite audit secara lengkap dan tidak dihadiri oleh pihak yang mungkin juga berkepentingan, seperti pihak manajemen atau auditor eksternal.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Variabel ukuran komite audit (ACSIZE) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,574 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,478 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ke-3 tidak diterima dan dapat dinyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatements*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial restatements* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil tersebut dikarenakan rata-rata sampel penelitian telah memiliki proporsi komite audit independen yang tinggi sebesar 3,2963 yang dimungkinkan hanya sekadar memenuhi ketentuan formal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Namun, keberadaan komite audit

tidak mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *financial restatements*.

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Variabel keahlian komite audit (NOEXPERT) menunjukkan koefisien regresi sebesar -1,164 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,016 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ke-4 diterima dan dapat dinyatakan bahwa keahlian komite audit berpengaruh terhadap *financial restatements*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian keuangan/ akuntansi dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap *financial restatements* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal tersebut dikarenakan rata-rata proporsi komite audit yang memiliki keahlian keuangan/ akuntansi pada perusahaan yang melakukan *financial restatements* hanya 2,5185 yang dimungkinkan hanya sekadar memenuhi ketentuan formal sesuai Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatements*.
2. Frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatements*.

3. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatements*.
4. Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

Saran

1. Menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.
2. Menambahkan karakteristik komite audit dan unsur *corporate governance* yang lain sebagai variabel independen yang dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya *financial restatements*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., & Rama, D. V., 2003. *Audit, Non-Audit And Information Technology Fees: Some Empirical Evidence*, *Accounting & the Public Interest*, 3, 1–20.
- Abdullah, S.N., Nor Zalina Mohamad Y., dan Mohamad Naimi Mohamad N, 2010. *Financial Restatement and Corporate Governance among Malaysia Listed Companies*, *Managerial Auditing Journal*. Vol.25, No.6, pp. 526-552.
- Ali, Mazurina Mohd, Syarifah Saffa Najwa Tuan Besar, dan Nor'Azam Mastuki Mastuki, 2017. *Audit Committee Characteritics, Risk Management Committee, and Financial Restatements*, American Scientific Publishers, Vol. 23, 287-291.
- Al-Najjar, B, 2011. *The Determinants of Audit Committee Independence and Activity: Evidence from the UK*, *International Journal of Auditing*, 15(2), 191–203.
- Arthaud-Day, M. L., Certo, S. T., Dalton, C. M., & Dalton, R, 2006. *A changing of the guard: Executive and director turnover following corporate financial restatements*, *Academy of Management Journal*, 49(6), 1119–1236.
- Bareksa.com, 2018. *Efek Revisi Lapkeu 2016, Saham BBKP Sentuh Level Terendah Sejak 9 April*, 2010. <https://www.bareksa.com/id/text/2018/04/30/efek-revisi-lapkeu-2016-saham-bbcp-sentuh-level-terendah-sejak-9-april-2010/19159/news>, 24 Oktober 2018.
- Bursa Efek Indonesia, 2018. *Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Emiten 2016-2017*, www.idx.co.id. 10 September 2018.
- Carcello, Joseph V., Terry L. Neal, Zoe-Vonna Palmrose and Susan Scholz, 2011. *CEO Involvement in Selecting Board Members, Audit Committee Effectiveness, and Restatement*, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 28.
- Detik.com. 2018. “*Bank Bukopin Permak Laporan Keuangan, Ini kata BI dan OJK*”, <https://finance.detik.com/moneter/d-3994551/bank-bukopin-permak-laporan-keuangan-ini-kata-bi-dan-ojk>, 13 Juni 2018.
- Financial Accounting Standards Board (FASB), 2018. *Summary Statement No. 154: Accounting Changes and Error Corrections*, <https://www.fasb.org/summary/stsum154.shtml>, 13 Oktober 2018.

- Forum For Corporate Governance Indonesia (FCGI), 2002. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariance SPSS 25 Edisi 9*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Government Accountability Office (GAO), 2006. *Financial Restatements: Update of Public Company Trends, Market Impacts, and Regulatory Enforcement Activities.*, Government Printing Office, Washington, DC.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 25*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, 2007. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H, 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Lary, Akeel M. dan Dennis W. Taylor, 2012. *Governance Characteristics and Role Effectiveness of Audit Committees*, Managerial Auditing Journal, Vol. 27 No. 4, pp 336-354.
- Lin, Jerry W., June F. Li dan Joon S. Yang, 2006. *The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality*, Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 9, Hal. 921 – 933.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.*
- Veronica, Sylvia. dan Yanivi S. Bachtiar, 2005. *Corporate Governance, Information Asymetry, and Earnings Management*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume II, No. 1, Hal 77-106.
- Wasilah, 2005. *Hubungan antara Informasi Asimetri dan Praktek Perataan Laba di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume II, No. 1, Hal 1-23.
- Wan Masliza Wan Mohammad, Shaista Wasiuzzaman, Seyed Shahriar Morsali & Rapiah Mohd Zaini, 2018. *The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements in Malaysia*, Journal of Asia-Pacific Business.